



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Manajemen BLUD: **Bintek Staff Puskesmas Kabupaten Grobogan**

Hotel Inna Garuda
Jogja, 17 Februari 2017

Wahyudi Kumorotomo
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)



BLU (*Semi Autonomous Revenue Agencies*):

Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan yang “dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan” dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(UU No.1/2004)

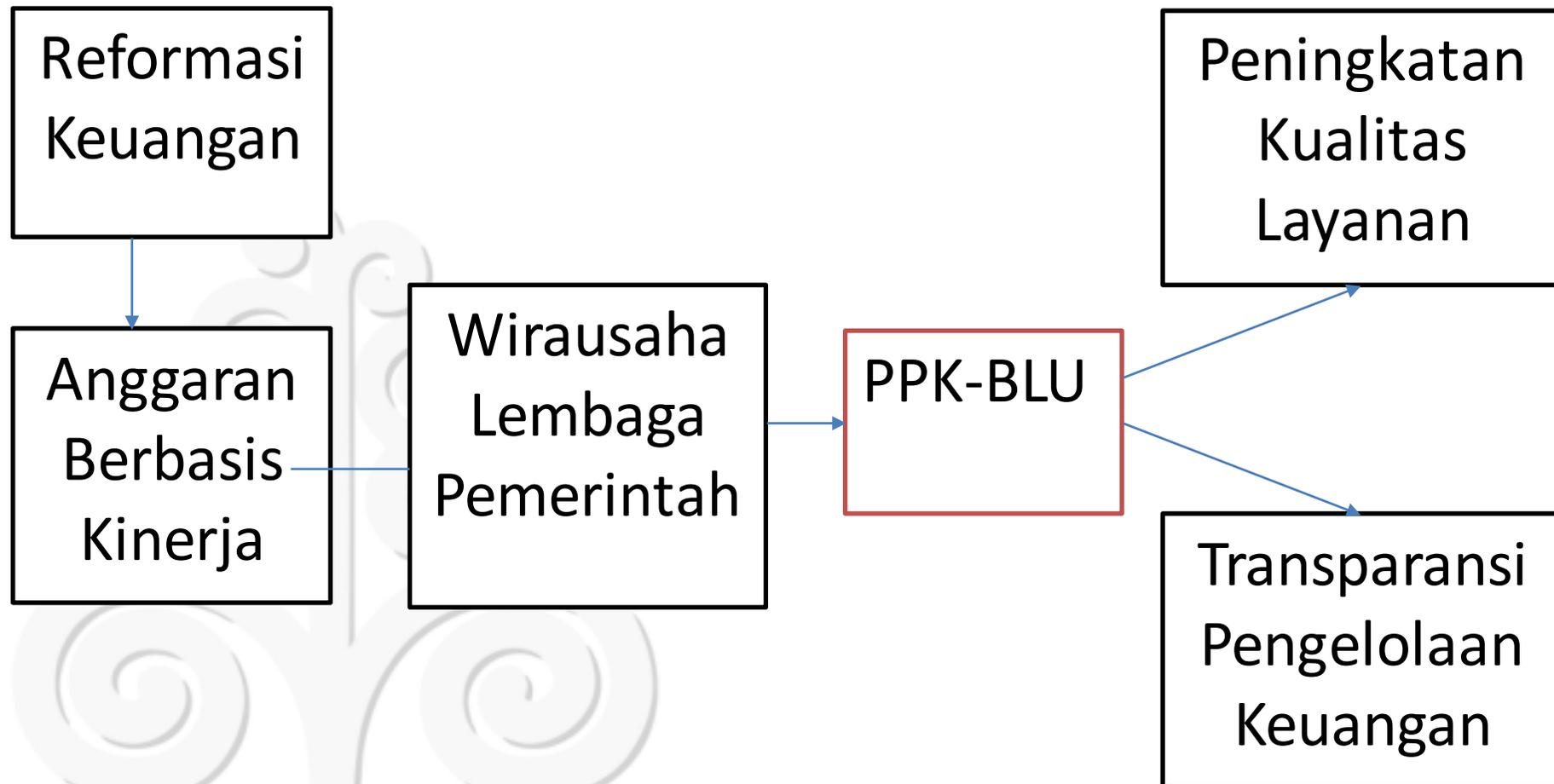
Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-BLU.

Kaidah manajemen BLU:

1. Orientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Akuntabilitas dan transparansi.



Apa Pentingnya BLU?





Kualitas kesehatan yang baik bermula dari kebijakan sosial & sistem pelayanan yang baik...



“Governments have choices about how to best allocate their resources within the health sector — between different types of health services, between different modes of financing and delivery, and between different levels of care — all of which have implications for improving the health of the poor (Shah, 2005).



Visi dan Misi Pemkab Grobogan (RPJMD kab. Grobogan 2005-2025)

- **Visi**

“Terwujudnya Kabupaten grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”

- **Misi**

- a. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah
- b. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan
- c. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan
- d. Memantapkan pembangunan ekonomi di bidang pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata
- e. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik
- f. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan



Profil Daerah

Kab. Grobogan merupakan kabupaten terluas ke-2 di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa dengan jumlah penduduk miskin 17,86% (BPS,2010).



Penghargaan :

1. Satya Lencana di Bidang Pembangunan Pertanian (Juara nasional 2011)
2. Juara 1 Kelompok tani tingkat nasional dengan varietas unggulan “Kedelai Grobogan”

Analisis Dukungan APBD pada visi dan misi pemerintah kabupaten

- Total belanja modal tahun 2014 sejumlah Rp 296 M (18,19 % APBD)
- 5 SKPD/BLU dengan Belanja Modal terbesar
 1. Dinas Bina Marga (Rp. 110 M)
 2. Dinas Pendidikan (Rp. 55 M)
 3. Dinas Pengairan (Rp. 49 M)
 4. Dinas Cipta Karya (Rp. 34 M)
 5. Rumah Sakit (Rp. 12 M)

Efisiensi Teknis Anggaran Kesehatan

Kota/kabupaten	Efisiensi			Rata-rata Efisiensi
	2005	2006	2007	
Cilacap	38.46	49.8	35.93	41.40
Banyumas	27.8	37.2	33.92	32.97
Purbalingga	41.98	52.32	45.32	46.54
Banjarnegara	52.78	65.31	64.54	60.88
Kebumen	43.28	57.68	33.86	44.94
Purworejo	52.13	59.15	48.15	53.14
Wonosobo	55.32	76.12	63.83	65.09
Magelang	41.12	46.75	42.77	43.55
Boyolali	47.77	53.81	39.07	46.88
Klaten	52.54	66.08	50.08	56.23
Sukoharjo	57.69	64.36	51.5	57.85
Wonogiri	48.8	58.17	41.72	49.56
Karanganyar	58.86	75.22	58.18	64.09
Sragen	53.11	61.46	45.46	53.34
Grobogan	49.19	60.99	42.67	50.95
Blora	46.87	61.05	49.82	52.58
Rembang	48.46	57.45	50.27	52.06
Pati	31.76	40.28	31.95	34.66
Kudus	38.54	37.08	36.01	37.21
Jepara	43.13	53.75	37.53	44.80
Demak	43.16	65.13	59.99	56.09
Semarang	39.69	53.98	35.94	43.20
Temanggung	60.44	83.93	59.68	68.02
Kendal	45.69	51.48	44.53	47.23
Batang	60.66	65.4	54.49	60.18
Pekalongan	47.64	45.39	34.94	42.66
Pemalang	42.43	54.12	42.61	46.39
Tegal	40.49	55.39	36.02	43.97
Brebes	39.85	49.17	33.25	40.76
Kota magelang	100	100	100	100.00
Kota surakarta	98.89	84.02	44.14	75.68
Kota salatiga	100	86.41	73.19	86.53
Kota semarang	38.49	44.27	34.64	39.13
Kota pekalongan	100	100	100	100.00
Kota tegal	48.3	62.56	53.11	54.66

Sumber: Hakimudin, 2010



Renstra Kesehatan 2015-2019

Provinsi Jawa Tengah



1. **Program sumberdaya kesehatan;** 24 indikator output, 15 indikator outcome, 9 kegiatan.
2. **Perbaikan gizi masyarakat;** 10 indikator output, 4 indikator outcome, 2 kegiatan.
3. **Akses layanan kesehatan masyarakat;** 71 indikator output, 39 indikator outcome, 17 kegiatan.
4. **Pengembangan lingkungan sehat;** 5 indikator output, 2 indikator outcome, 1 kegiatan dg 5 sub-kegiatan terpadu.
5. **Pencegahan dan penanggulangan penyakit;** 27 indikator output, 2 indikator outcome, 28 kegiatan.
6. **Farmasi dan perbekalan kesehatan;** 15 indikator output, 6 indikator outcome, 6 kegiatan.
7. **Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;** 10 indikator output, 2 indikator outcome, 8 kegiatan.

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2011

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja th 2009 thd Target	Capaian Indikator Kinerja th 2010 thd Target	Capaian Indikator Kinerja th 2011 thd Target
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	18	5 (27,78%)	6 (33,33%)	7 (38,89%)
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	2	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
3	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB	1	1 (100%)	0 (0,00%)	1 (100%)
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1 (100%)
Jumlah		22	6 (27,27%)	6 (27,27%)	9 (40,91%)

Tabel 3.2
Persentase Pencapaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011



Persentase Pencapaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan		
≥ 50%	≥40,9% – <50%	< 40,9%
24 Kab/kota (68,57%)	8 Kab/kota (22,86%)	3 Kab/Kota (8,57%)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Demak (77,3%) 2. Kt Pekalongan (77,3%) 3. Sukoharjo (68,2%) 4. Kudus (68,2%) 5. Kota Salatiga (68,2%) 6. Kota Surakarta (63,6%) 7. Kota Tegal (63,6%) 8. Kebumen (59,1%) 9. Purworejo (59,1%) 10. Wonosobo (59,1%) 11. Magelang (59,1%) 12. Sragen (59,1%) 13. Blora (59,1%) 14. Temanggung (59,1%) 15. Kota Magelang (59,1%) 16. Banyumas (54,5%) 17. Purbalingga (54,5%) 18. Pati (54,5%) 19. Pekalongan (54,5%) 20. Brebes (54,5%) 21. Banjarnegara (50%) 22. Grobogan (50%) 23. Jepara (50%) 24. Kab. Semarang (50%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karanganyar (45,5%) 2. Rembang (45,5%) 3. Kendal (45,5%) 4. Kota Semarang (45,5%) 5. Cilacap (40,9%) 6. Batang (40,9%) 7. Pemalang (40,9%) 8. Tegal (40,9%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boyolali (36,4%) 2. Klaten (36,4%) 3. Wonogiri (36,4%)

Dasar Hukum BLU Puskesmas



1. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. PP No.96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
8. Peraturan Menteri Keuangan No 44/PMK.05/2009 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran BLU
9. Permenkes No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas.



Pengertian RBA

- Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLU.
- BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).



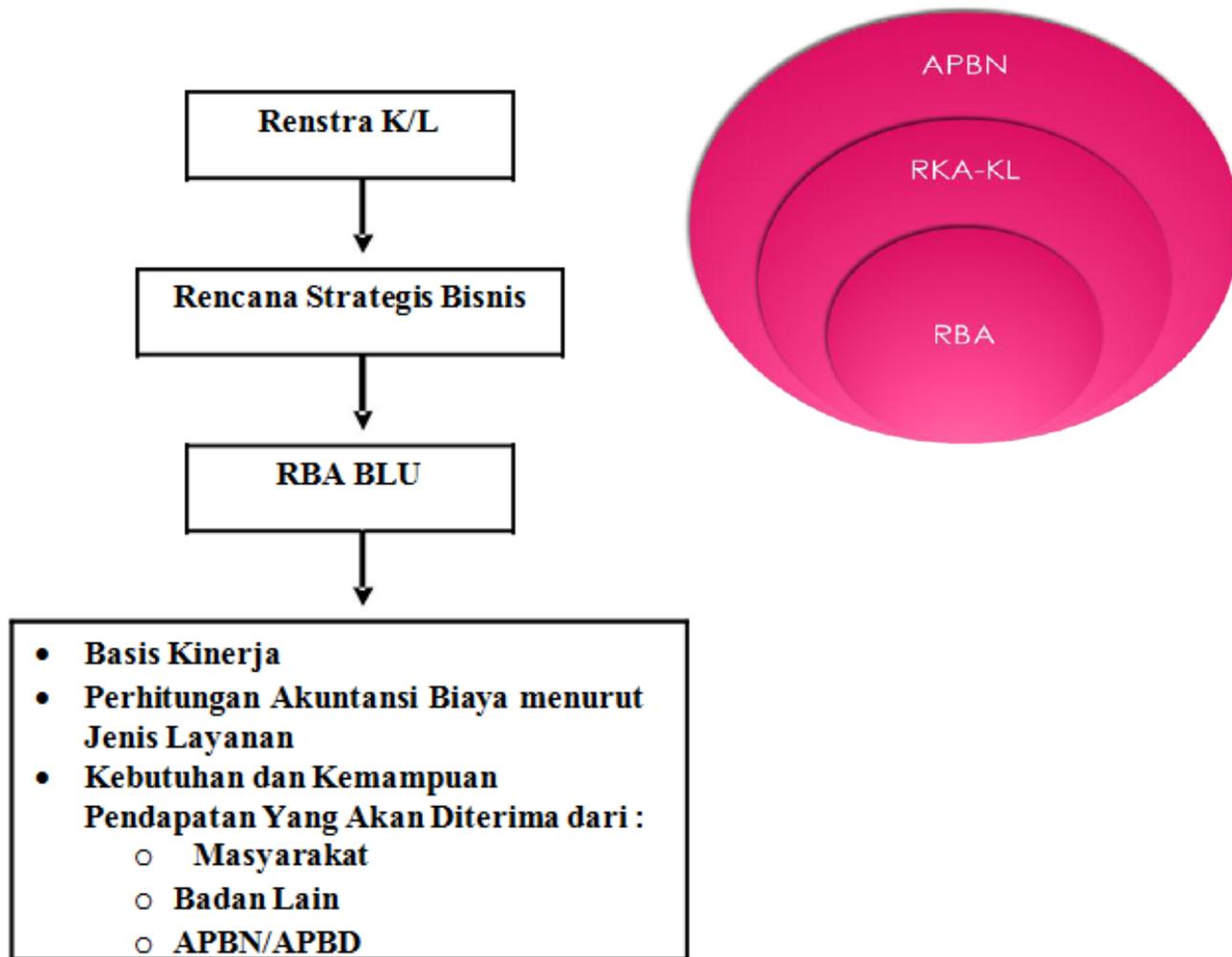
Penyusunan RBA

BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis lima tahunan tersebut.

RBA disusun berdasarkan :

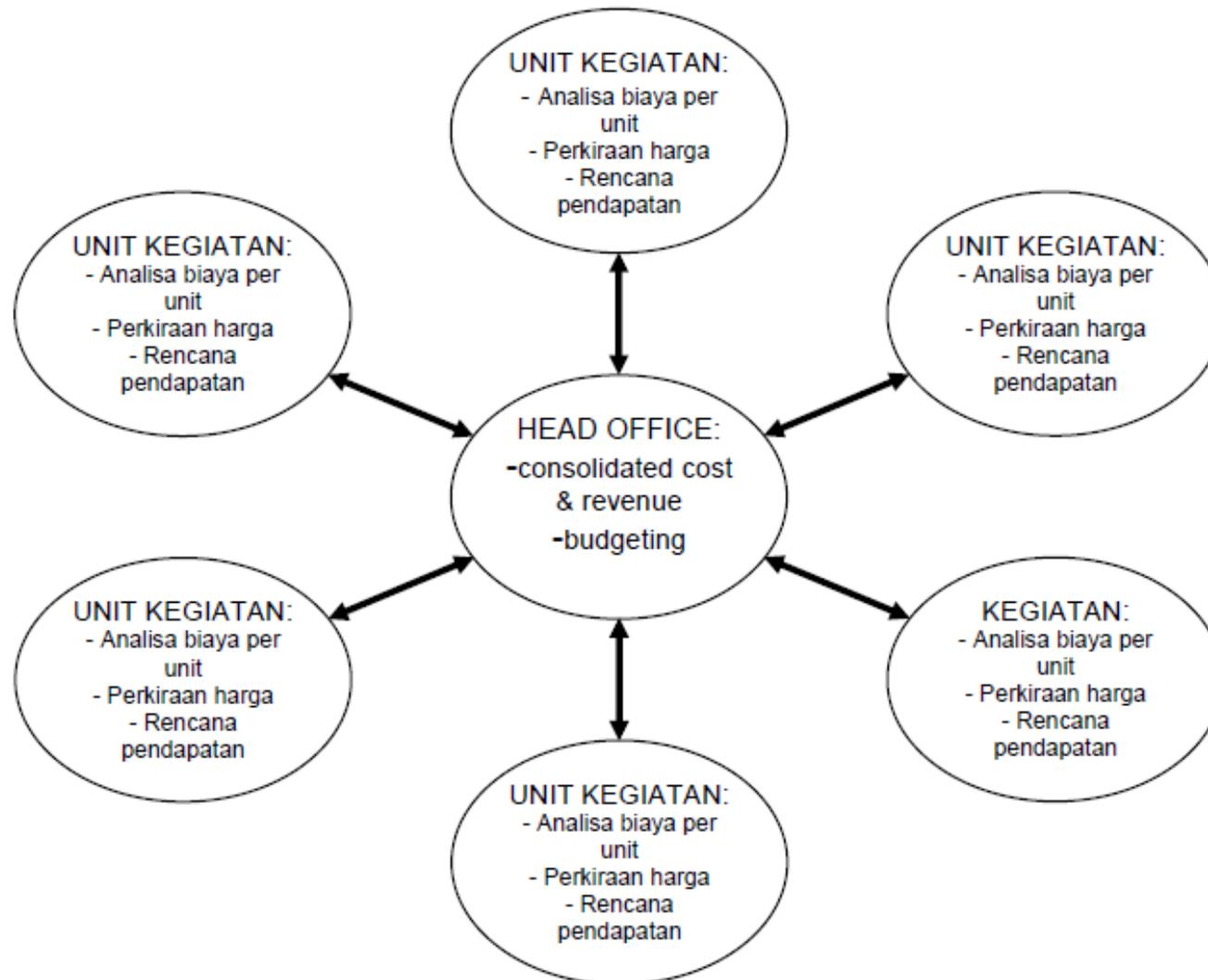
- a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
- b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengajuan dan Penetapan RBA-BLU





SKEMA PENYUSUNAN RBA



DASAR-DASAR PENYUSUNAN RBA



- 1.1 RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- 1.2 RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 1.3 RBA disusun berdasarkan basis akrual.
- 1.4 RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexibel budget) yang memberikan keleluasaan penggunaan belanja dalam RBA untuk bertambah atau berkurang secara proporsional terhadap pendapatan BLU selain yang bersumber dari APBN.

PERKIRAAN BIAYA PER KEGIATAN



- a. Untuk memudahkan menghitung biaya per kegiatan (output), satker BLU perlu mengidentifikasi dan mengelompokkan unit-unit kerja yang menjadi revenue center dan cost center. Di dalam revenue center unit terdapat kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan, sementara kegiatan-kegiatan yang hanya menimbulkan biaya dikelompokkan di cost center unit.
- b. Untuk satu jenis kegiatan, tentukan jenis biaya dan besaran biaya per unit kegiatan. Jenis biaya dapat berupa: biaya langsung variabel, biaya langsung tetap, biaya tidak langsung variabel, dan biaya tidak langsung tetap.

PERKIRAAN BIAYA PER KEGIATAN



- c. Hitung biaya per jenis kegiatan dengan mengalikan rincian biaya dengan satuan biaya. Dalam penentuan satuan biaya agar mengacu kepada Standar Biaya Umum; atau Standar Biaya Khusus yang ditetapkan Menteri Keuangan; atau harga pasar.
- d. Jumlahkan seluruh komponen biaya untuk mendapatkan biaya satuan per kegiatan. Biaya satuan per kegiatan merupakan biaya pokok produksi suatu kegiatan.
- e. Apabila kegiatan tersebut termasuk dalam kelompok revenue center unit dan akan ditentukan besaran tarifnya maka jumlahkan biaya satuan per



ILUSTRASI

<u>REVENUE CENTER UNIT</u>	<u>COST CENTER UNIT</u>
<p><u>Pendapatan :</u> Volume x Tarif layanan = XXXX</p> <p><u>Biaya langsung:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya Variabel : Volume x Tarif layanan = XXXX▪ Biaya Tetap : <u>Standar Biaya</u> = XXXX Total Biaya Langsung = XXXX <p><u>Biaya Tidak Langsung :</u></p> <p>Unit A</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Persentase x Biaya unit A = XXXX <p>Unit B</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <u>Persentase x Biaya unit B</u> = XXXX Total Biaya Tidak Langsung XXXX	<p><u>Kegiatan :</u> Volume Input</p> <p><u>Biaya langsung:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya Variabel : Volume x Tarif layanan = XXXX▪ Biaya Tetap : <u>Standar Biaya</u> = XXXX Total Biaya Langsung = XXXX <p style="text-align: center;">% sesuai Alokasi Biaya</p>

Maksud dan Tujuan Badan Layanan Umum



Contoh Tujuan Tidak Memenuhi Kriteria	Contoh Tujuan Yang Memenuhi Kriteria
1. Melanjutkan pelayanan kepada masyarakat. (tidak menantang)	1. Meningkatkan pelayanan perijinan dengan mutu tepat, cepat dan murah.
2. Memproses isian registrasi. (tidak jelas maksudnya)	2. Mempercepat pengolahan isian registrasi kelahiran.
3. Memproses kenaikan pangkat 2,000 pegawai. (terlalu spesifik)	3. Memproses kenaikan pangkat sebanyak 25 % dari total pegawai pada setiap tahun.

Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas



Pejabat Pengelola BLU

Pejabat pengelola BLU terdiri atas:

a. Pemimpin.

Pemimpin berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban:

- 1) menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;
- 2) menyiapkan RBA tahunan;
- 3) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 4) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas



b. Pejabat keuangan.

Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban :

- 1) mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- 2) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
- 3) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- 4) menyelenggarakan pengelolaan kas;
- 5) melakukan pengelolaan utang-piutang;
- 6) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
- 7) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- 8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

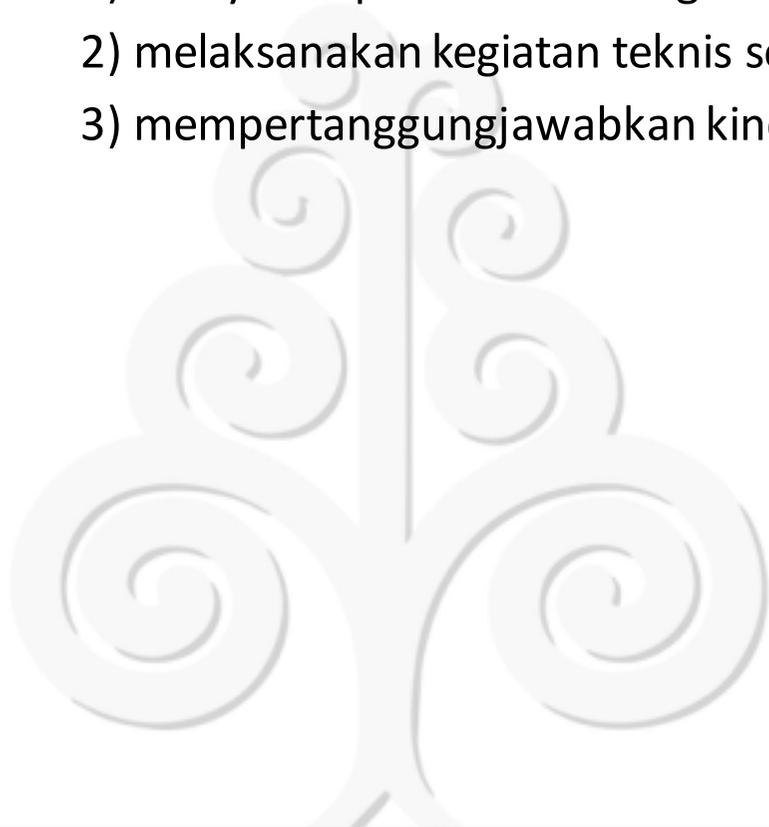


c. Pejabat Teknis.

Pejabat teknis BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing

yang berkewajiban:

- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- 2) melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
- 3) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.



Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas



Pembentukan Dewan Pengawas berlaku hanya pada BLU yang memiliki :

- a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau
- b. Nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Perbandingan antara Asumsi RBA dan Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan



Contoh, dengan asumsi peningkatan pelayanan rata-rata 5% pada RBA tahun berjalan terlihat dari Realisasi periode Januari – Agustus tahun berjalan telah tercapai 60% (8 bulan) dan Prognosa sampai dengan Desember tahun berjalan akan tercapai rata-rata 100% dari target. Jika tidak tercapai dijelaskan apakah karena asumsinya over estimated serta pengaruhnya terhadap kinerja yang dicapai tahun berjalan.

Pencapaian Kinerja per Unit



Pencapaian kinerja harus tertuang dalam volume kegiatan tiap-tiap unit dan jumlah rupiah.

Contoh tabel Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan :

Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan

No.	Uraian	RBA Tahun Berjalan		Realisasi s.d. bulan		Prognosa Tahun Berjalan	
		Volume	Rupiah	Volume	Rupiah	Volume	Rupiah
1	Pelayanan A						
2	Pelayanan B						
3	Pelayanan C						
	Jumlah						

Pencapaian Program Investasi



Program dan Pencapaian Investasi Tahun Berjalan

No.	Program Investasi	RBA Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d. bulan (Rp)	Prognosa Tahun Berjalan (RP)
A	Sumber APBN			
	1. Gedung / Bangunan			
	2. Peralatan			
	3. dan lain-lain			
B	Sumber Pendapatan Operasional			
	1. Gedung / Bangunan			
	2. Peralatan			
	3. dan lain-lain			
	Jumlah			

Laporan Keuangan Tahun Berjalan



LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Periode yang berakhir

Rp000

URAIAN 1	RBA Tahun Berjalan 2	Prognosa Tahun Berjalan 3	% 4 = (3/2)
A. PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional dari Jasa Layanan			
a)			
b)			
2. Hibah			
a) Terikat			
b) Tidak Terikat			
3. Pendapatan Lainnya			
a) Hasil kerjasama dengan pihak lain			
b) Hasil usaha lainnya			
c) Dan lain-lain			
4. Pendapatan dari APBN			
a) Operasional			
b) Investasi			
Jumlah Pendapatan			
B. BIAYA OPERASIONAL			
1. Biaya Pelayanan			
a) Biaya Pegawai			
b) Biaya Bahan			
c) Biaya Jasa Pelayanan			
d) Biaya Pemeliharaan			
e) Biaya Daya dan Jasa			
f) Dan Lain-lain			
Jumlah Biaya Pelayanan			
2. Biaya Umum dan Administrasi			
a) Biaya Pegawai			
b) Biaya Administrasi Kantor			
c) Biaya Pemeliharaan			
d) Biaya Langganan Daya dan Jasa			
e) Biaya Promosi			
f) Dan Lain-lain			
Jumlah Biaya Umum & Administrasi			
Jumlah Biaya Operasional			
C. SURPLUS/DEFISIT SETELAH BIAYA OPERASIONAL			
1. Pendapatan Non Operasional			
a) Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan			
b) Pendapatan Sewa			
c) Hasil Penjualan Aset Tetap			
d) Non Operasional Lainnya			
Jumlah Pendapatan Non Operasional			
2. Biaya Non Operasional			
a) Biaya Bunga			
b) Biaya Administrasi Bank			
c) Rugi Penjualan Aset Tetap			
d) Rugi Penurunan Nilai Persediaan			
e) Biaya Non Operasional Lainnya			
Jumlah Biaya Non Operasional			
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN			

Laporan Arus Kas Tahun Berjalan



LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang berakhir

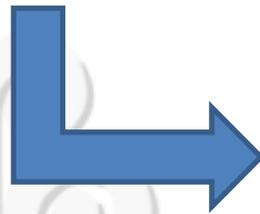
Rp000

Uraian	RBA Satu Tahun	Triwulan			Prognosa Triwulan IV
		I	II	III	
1	2	3	4	5	6
I. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional					
A. Pendapatan dari Layanan					
B. Pengeluaran Operasional					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional					
II. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
A. Hasil Penjualan Aset Tetap					
B. Hasil Penjualan Aset Lain-lain					
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi					
III. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
A. Tambahan Ekuitas					
B. Penerimaan Hibah					
C. Penerimaan APBN					
D. Perolehan Pinjaman					
E. Pembayaran Pinjaman					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan					
Kenaikan Bersih Kas					
Kas dan Setara Kas Awal					
Jumlah Saldo Kas					

Laporan Keuangan Tahun Berjalan



Pragnosa Laporan Keuangan Tahun...



No.	URAIAN	FORMULA	HASIL
A. RASIO LIKUIDITAS			
1.	Cash Ratio (Rasio Kas)	$\frac{\text{Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$ %
2.	Current Ratio (Rasio Lancar)	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$ %
3.	Net Working Capital of Sales (Perbandingan Modal Kerja Bersih dengan Penjualan)	$\frac{\text{Modal Kerja Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$ %
B. RASIO AKTIVITAS			
1.	Inventory Turn Over (Perputaran Persediaan)	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Persediaan}}$ kali
2.	Receivable Turn Over (Perputaran Piutang)	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Piutang}}$ kali
3.	Collection Period (Periode Perputaran Piutang)	$\frac{\text{Piutang} \times 360 \text{ hari}}{\text{Pendapatan Netto}}$ hari
4.	Current Asset Turn Over (Perputaran Aset Lancar)	$\frac{\text{Pendapatan Netto}}{\text{Aset Lancar}}$ kali
5.	Fixed Asset Turn Over (Perputaran Aset Tetap)	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Aset Tetap}}$ kali
6.	Total Asset Turn Over (Perputaran Total Aset)	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Total Aset}}$ kali
7.	Sales to Net Working Capital (Rasio Penjualan terhadap Modal Kerja)	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Net Working Capital}}$ kali
C. RASIO TINGKAT HUTANG			
1.	Debt to Total Asset (Rasio Hutang Terhadap Total Aset)	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ %
2.	Time Interest Eamed (Rasio Pencakupan Bunga)	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Bunga}} \times 100\%$ %
D. RASIO SOLVABILITAS			
1.	Solvabilitas (Rasio Total Aset terhadap Hutang)	$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$ %
2.	Debt to Equito Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Equity}} \times 100\%$ %
E. RASIO RENTABILITAS			
1.	Gross Profit Margin (Rasio Margin Laba Kotor)	$\frac{\text{Surplus Operasional}}{\text{Pendapatan Netto}} \times 100\%$ %
2.	Net Profit Margin (Margin Laba Usaha Bersih)	$\frac{\text{Surplus Operasional}}{\text{Pendapatan Netto}} \times 100\%$ %
3.	Net Return on Investment (Tingkat Pengembalian Investasi Bersih)	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ %
4.	Return on Capital Employed (Tingkat Pengembalian Modal)	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$ %
5.	Net Return on Equity (Tingkat Pengembalian Ekuitas Bersih)	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Equity}} \times 100\%$ %

Laporan Keuangan Tahun Berjalan



Agar dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan :

- 1) Kebijakan keuangan, ekonomi makro.
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.
- 3) Kebijakan akuntansi yang mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip prinsip akuntansi
- 4) Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
- 5) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan.

Laporan Keuangan Tahun Berjalan



Hal-hal lain yang perlu dijelaskan dalam hubungannya dengan pencapaian kinerja BLU antara lain :

1. Penghapusan Piutang.
2. Penghapusan Persediaan.
3. Penghapusan Aset Tetap.
4. Penghapusan Aset lain-lain.
5. Pemberian Pinjaman.
6. Kerjasama jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga.
7. Penghasilan Pengelola BLU dan Dewan Pengawas.

Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat



A. Contoh tabel perhitungan anggaran biaya per kegiatan dan output

Unit Kerja :		Tahun :
Program :		
Kegiatan :		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan		
Keluaran		
Anggaran Belanja		
Jenis Belanja	Rincian Biaya (Satuan x Harga)	Jumlah Anggaran (RP)
I. Biaya Langsung		
A. Biaya Variabel		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. dst.		
Jumlah Biaya Variabel		
B. Biaya Tetap		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. dst.		
Jumlah Biaya Tetap		
Jumlah Biaya Langsung		
II. Biaya Tidak Langsung		
A. Biaya Variabel		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. dst.		
Jumlah Biaya Variabel		
B. Biaya Tetap		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. dst.		
Jumlah Biaya Tetap		
Jumlah Biaya Tidak Langsung		
Jumlah Biaya		
Biaya Per Unit Output		

Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit



Unit :	Tahun :	
	Output	
	(tahun berjalan)	(tahun yang diusulkan)
Uraian	Jumlah Anggaran	
	(tahun berjalan)	(tahun yang diusulkan)
I. Pendapatan :		
1. Pendapatan dari Pelayanan		
2. Pendapatan dari Hibah		
3. Pendapatan		
Jumlah Pendapatan		
II. Biaya :		
A. Biaya Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. dst.		
Jumlah Biaya Langsung		
B. Biaya Tidak Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. dst.		
Jumlah Biaya Tidak Langsung		
Jumlah Biaya		
Surplus/Defisit		

Rencana Pendapatan dan Biaya BLU



Uraian	Jumlah Anggaran	
	(tahun berjalan)	(tahun yang diusulkan)
I. Pendapatan :		
1. Pendapatan dari Pelayanan		
2. Pendapatan dari Hibah		
3. Pendapatan		
Jumlah Pendapatan		
II. Biaya :		
A. Biaya Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. dst.		
Jumlah Biaya Langsung		
B. Biaya Tidak Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. dst.		
Jumlah Biaya Tidak Langsung		
Jumlah Biaya		
Surplus/Defisit sebelum Pendapatan dari APBN		
Pendapatan dari APBN		
Surplus/Defisit Akhir		

Anggaran BLU



A. Pendapatan BLU

NO	URAIAN	PROGNOSA PERIODE TAHUN BERJALAN	TARGET PERIODE YANG AKAN DATANG	PRAKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)	%
1.	Pendapatan Operasional dari Jasa Layanan				
	a)				
	b)				
2.	Hibah				
	a) Terikat				
	b) Tidak Terikat				
3.	Pendapatan Lainnya				
	a) Hasil kerjasama dengan pihak lain				
	b) Hasil usaha lainnya				
4.	Pendapatan dari APBN				
	a) Operasional				
	b) Investasi				
	Jumlah Pendapatan				

Anggaran BLU



B. Biaya Operasional

NO	URAIAN	PROGNOSA PERIODE TAHUN BERJALAN	TARGET PERIODE YANG AKAN DATANG	PRAKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)	%
	BIAYA OPERASIONAL				
A.	Biaya Pelayanan				
	1. Biaya Pegawai				
	2. Biaya Bahan Baku				
	3. Biaya Jasa Pelayanan				
	4. Biaya Penyusutan				
	5. Biaya Pemeliharaan				
	6. Biaya Daya dan Jasa				
	7. Biaya Amortisasi				
	Jumlah Biaya Pelayanan				
B.	Biaya Umum dan Administrasi				
	1. Biaya Pegawai				
	2. Biaya Administrasi Kantor				
	3. Biaya Penyusutan				
	4. Biaya Pemeliharaan				
	5. Biaya Daya dan Jasa				
	6. Biaya Promosi				
	7. Biaya Amortisasi				
	Jumlah Biaya Umum & Adm				
	Jumlah Biaya Operasional				

Anggaran BLU



D. Biaya Investasi (Belanja Modal)

NO	URAIAN	PROGNOSA PERIODE TAHUN BERJALAN	TARGET PERIODE YANG AKAN DATANG	PRAKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)	%
1.	Sumber dari APBN				
	a.				
	b.				
2.	Sumber dari Pendapatan Operasional				
	a.				
	b.				
	Jumlah Investasi				

Kondisi Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan



- Faktor internal meliputi :
 - a) Pelayanan.
 - b) Keuangan.
 - c) Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
 - d) Sarana dan Prasarana
- Cakupan analisis kondisi eksternal meliputi :
 - a) Undang-undang.
 - b) Kebijakan Pemerintah.
 - c) Keadaan persaingan.
 - d) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.
 - e) Perkembangan sosial budaya.
 - f) Perkembangan teknologi.

Gambaran Umum tentang Analisis Eksternal dan Internal BLU



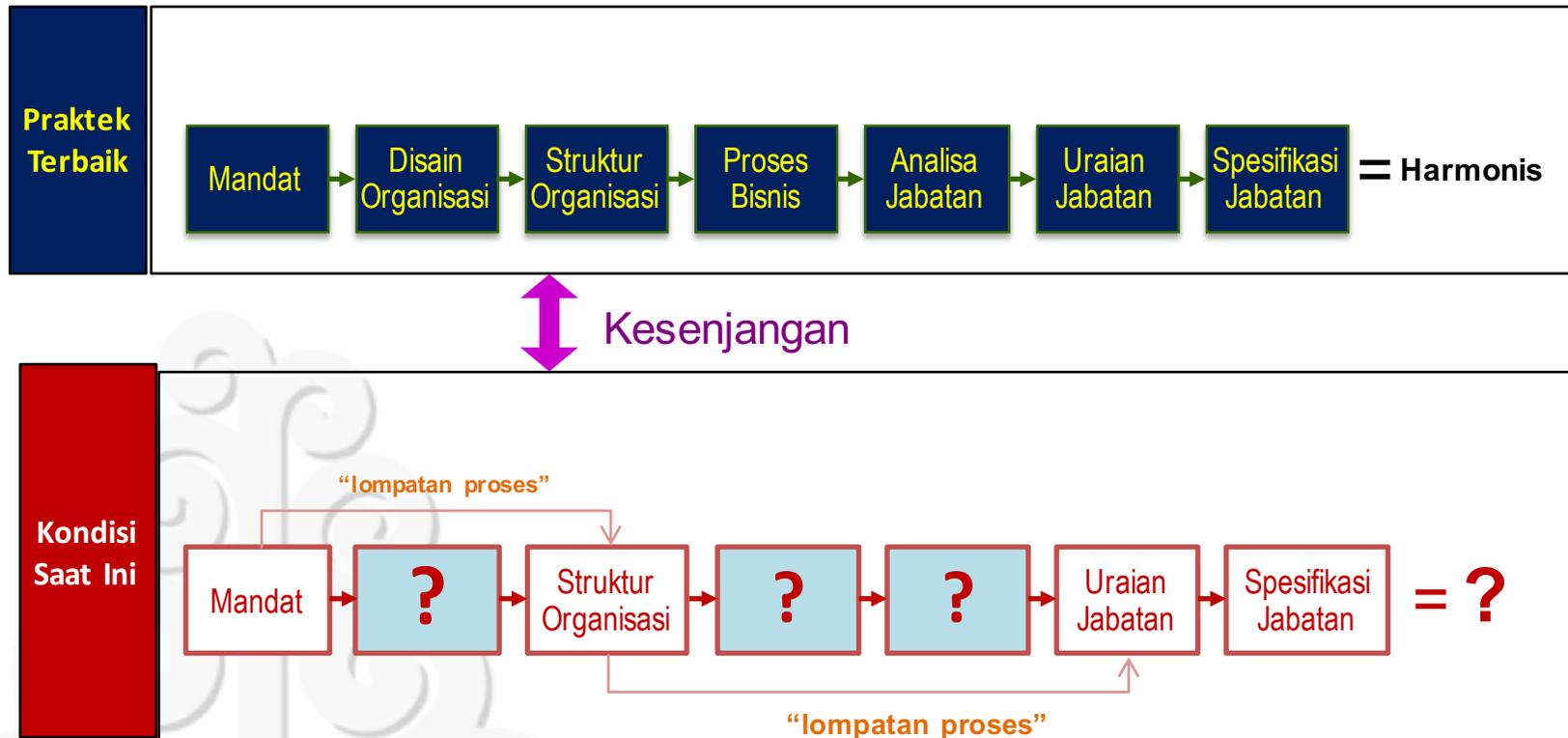
A. Analisis internal.

Meliputi :

- 1) Pelayanan.
- 2) Keuangan.
- 3) Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- 4) Sarana dan Prasarana.



MEMANFAATKAN ANALISIS JABATAN SECARA OPTIMAL



1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan bisnis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”;
3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja (SKP) secara spesifik dan terukur;

Pencapaian Kinerja per Unit



Unit Pelayanan:

1. Rawat Jalan : Poli umum, Poli KIA/KB, Poli Gigi, Poli Kusta, Poli TB
2. Rawat Inap
3. PONED
4. UGD
5. Persalinan Normal
6. Pelayanan Administratif
7. Laboratorium
8. Konsultasi : Kesehatan, Pojok Gizi.

Gambaran Umum tentang Analisis Eksternal dan Internal BLU



B. Analisis eksternal.

Cakupan analisis kondisi eksternal antara lain :

- 1) Undang-undang.
- 2) Kebijakan Pemerintah.
- 3) Keadaan persaingan.
- 4) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.
- 5) Perkembangan sosial budaya.
- 6) Perkembangan teknologi.

PP No.96/2012 ttg Pelayanan Publik



1. Ruang lingkup pelayanan publik
2. Sistem pelayanan terpadu → koherensi TIK (?)
3. Pedoman penyusunan Standar Pelayanan
4. Proporsi akses dan kategori Kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang
5. Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kategori Puskesmas di Grobogan



Perawatan	Non-Perawatan
1. Kedungjati	1. Karangrayung II
2. Karangrayung I	2. Penawangan I
3. Toroh I	3. Penawangan II
4. Geyer I	4. Toroh II
5. Pulokulon I	5. Geyer II
6. Kradenan I	6. Pulokulon II
7. Gabus I	7. Kradenan II
8. Ngaringan	8. Gabus II
9. Wirosari I	9. Wirosari II
10. Grobogan	10. Tawangharjo
11. Klambu	11. Purwodadi I
12. Godong I	12. Purwodadi II
13. Gubung I	13. Brati
	14. Godong II
	15. Gubung II
	16. Tegowanu
	17. Tanggunharjo

Standar Pelayanan (ps. 25 PP No.96/2012)

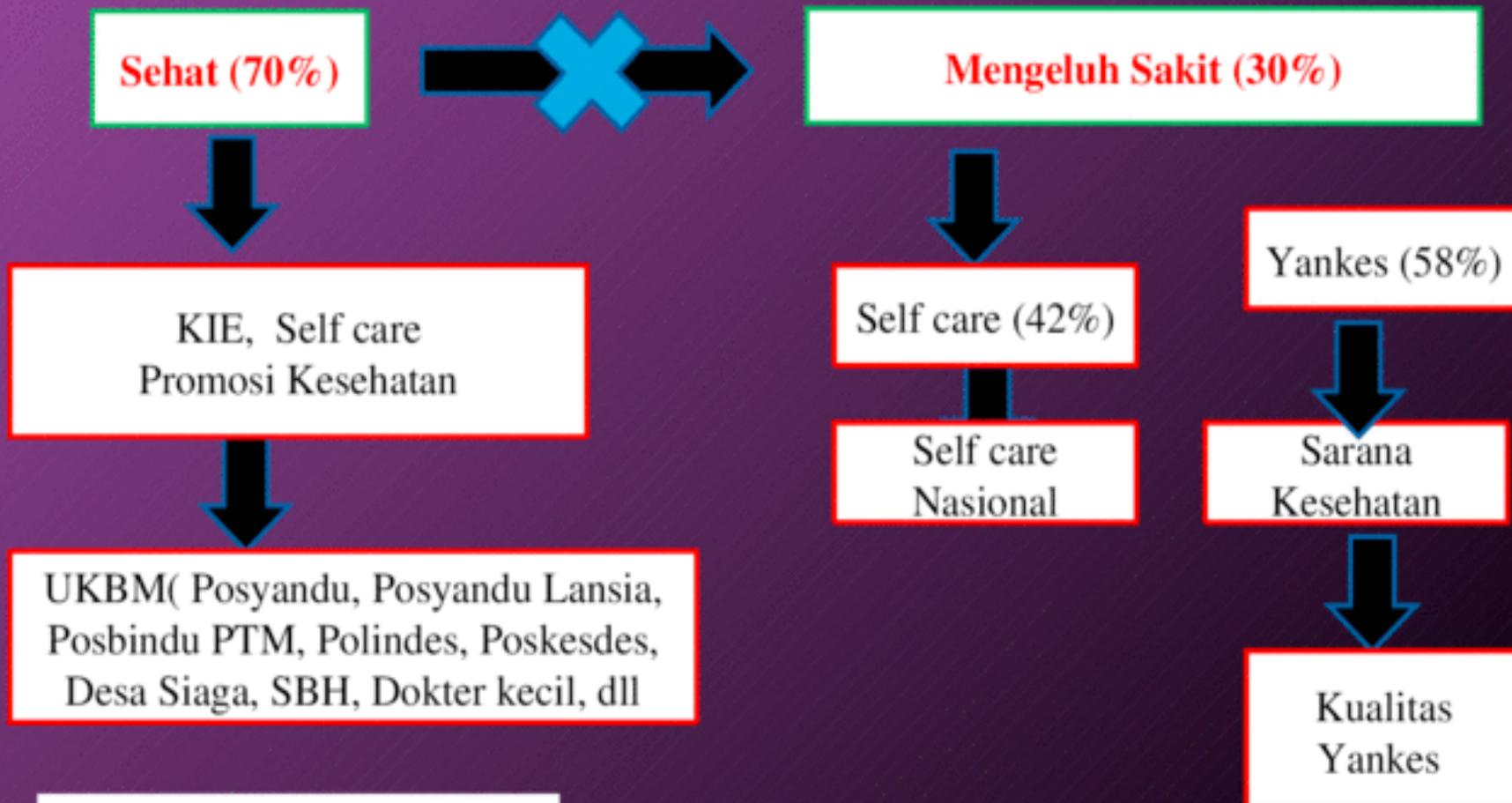
Dasar Kesepakatan dlm Maklumat Pelayanan (*Citizen Charter*)



1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya / Tarif
6. Produk pelayanan
7. Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas
8. Kompetensi pelaksana
9. Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan kepastian pelayanan.

PARADIGMA SEHAT :

Mengutamakan promotif –preventif



Sumber : Susenas 2010

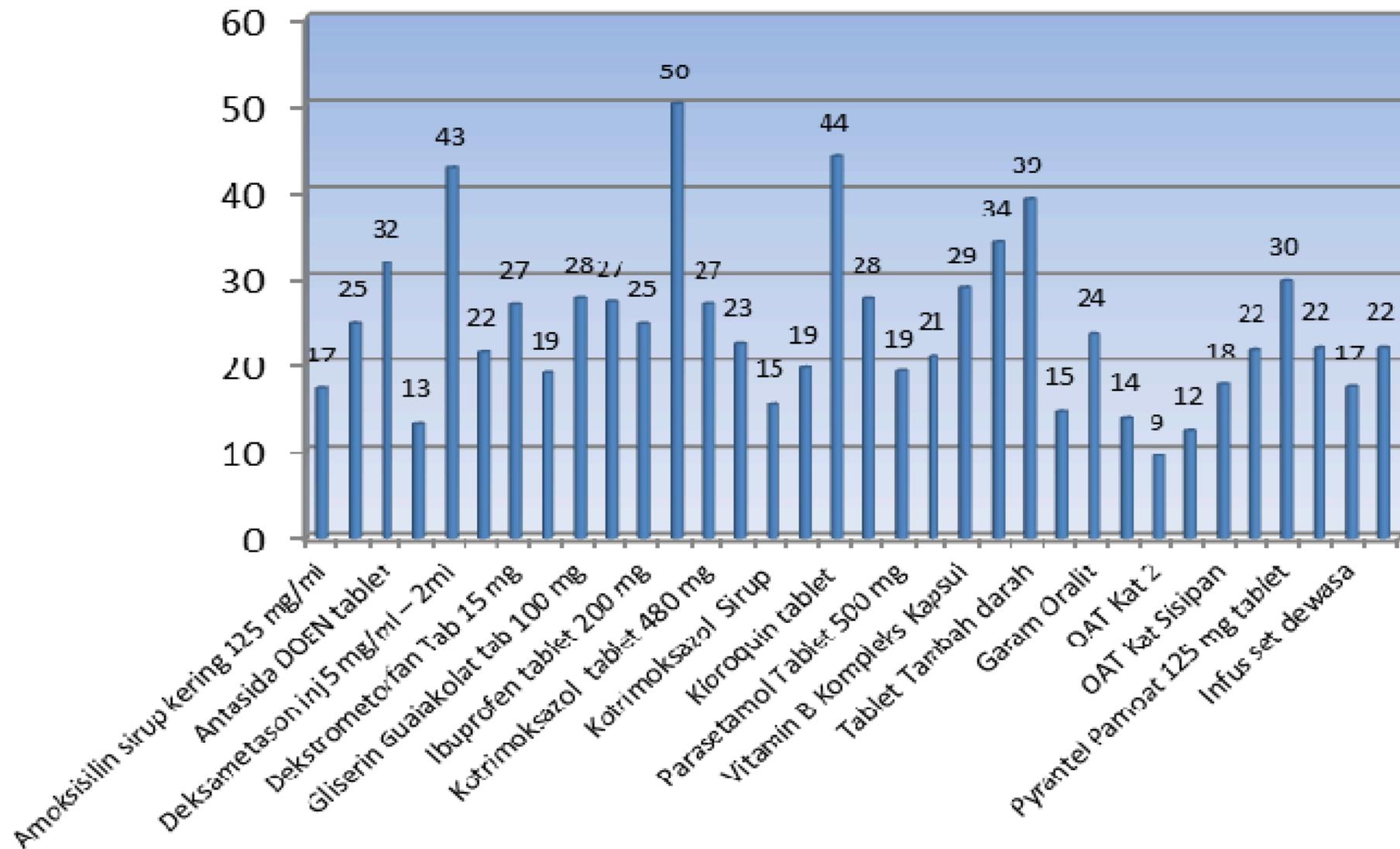
Variabel Pokok Rekam Medis



1. Identitas pasien
2. Tanggal masuk konsultasi medis & perawatan
3. Tanggal keluar
4. Lama perawatan
5. Tanggal lahir
6. Umur (tahun, bulan, hari) ketika dirawat
7. Umur ketika keluar dari Faskes
8. Jenis kelamin
9. Status medis ketika keluar
10. Berat lahir (gram)
11. Diagnosis primer
12. Diagnosis sekunder
13. Tindakan medis / pembedahan.



Tingkat Kecukupan Obat



Catatan: Apakah tingkat kecukupan berkorelasi dengan prevalensi penyakit di Grobogan?



Penutup

- Tantangan bagi status BLU bagi Puskesmas menyangkut: kemandirian keuangan, peningkatan kualitas pelayanan, profesionalisme pegawai, dan responsivitas layanan terhadap warga.
- Status BLU tidak mengubah tugas pokok Puskesmas dasar; paradigma sehat, kepedulian terhadap kebutuhan warga, akuntabilitas dan komitmen pada pemerataan layanan kesehatan.



UNIVERSITAS GADJAH MADA

TERIMA KASIH

